



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1012/SEK/HM.02.3/12/2017
Hal : Implementasi SIPP Versi
3.2.0 di Empat Lingkungan
Peradilan

8 Desember 2017

Yth.

Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
pada Empat Lingkungan Peradilan
di -
seluruh Indonesia

Menindaklanjuti perintah Ketua Mahkamah Agung dalam acara peluncuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan penyerahan Sertifikasi Penjaminan Mutu kepada Empat Lingkungan Peradilan, pada tanggal 29 November 2017 di Ball Room Hotel Clarion, Makassar, tentang kewajiban bagi seluruh pengadilan untuk menerapkan SIPP versi 3.2.0 sebelum tanggal 1 Januari 2018, berkenaan dengan itu, kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Updating* SIPP versi 3.2.0 dilakukan mulai tanggal 11 s.d. 31 Desember 2017 di seluruh Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan.
2. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama harus berkoordinasi dengan admin TI Tingkat Banding dalam melakukan *updating* SIPP versi 3.2.0 dan berkonsultasi dengan Tim Pengembang SIPP MA.
3. Pengadilan Tingkat Pertama yang belum melakukan *update* SIPP ke versi 3.2.0 setelah tanggal 11 Desember 2017 tidak dapat melakukan sinkronisasi data SIPP *local* ke SIPP MA.
4. Seluruh Pimpinan Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding terkait agar mendukung, memotivasi dan turut memantau pelaksanaan pemutakhiran SIPP versi 3.2.0.
5. *File Update* SIPP versi 3.2.0 bisa di *download* pada link: <https://goo.gl/S9XQfg>

Demikian, agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.